

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulrahman. (2004). *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- C.S.T. Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugangga, I.G.N. (1998). *Hukum Adat Khusus: Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*. Semarang.
- Jahroni, Jajang. (2016). *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima.
- Sumardjono, Maria S.W. (2005). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Busar, Muhammad. (2009). *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Simarmata, Rikardo. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.
- Usman, Rachamadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepomo. (2011). *Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Dewi, Sulastri. (2015). *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Harahap, Syahrin. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Depok: Siraja.

Santoso, Topo. (1990). *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Ersesco.

Taqwaddin. (2010). *Penguasaan atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 angka 15 tentang pedoman penataan lembaga.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi.

Kutipan dari Internet

Kebudayaan Adat Dayak, 2015, *Hukum Adat Dayak*, <https://Kebudayaan-Dayak.com/Budaya/0251/Jenisjenishukumadatbesertadendanya.Html> pada berbagaijenishukumadat,Adatpembunuhantaupatinyawa,Diakses pada 10 Mei 2023, Pukul 16:00 WIB (Penulis Drs. Albert Rufinus MA).

Nusapedia,2015,PerjanjianTumbanganoi,<https://www.nusapedia.com/2015/07/Perjanjian-Tumbang-Anoi-Menelisik.Html>, Diakses pada 10 Mei 2023, Pukul 16:00 WIB.